

ABSTRAK

Perkembangan terbaru bahwa proses implementasi kebijakan sering kali melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu. Tetapi organisasi yang terlibat dalam implementasi tidak saling tergantung antara satu dengan yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran stakeholder dan untuk menganalisis koalisi *stakeholder* dalam penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam di kawasan hutan alam Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan dengan teknik *purposive* dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *stakeholder utama*, yakni masyarakat pada umumnya, *stakeholder sekunder* yakni karyawan sementara dan *stakeholder kunci* yakni Kepolisian dan Dinas Kehutanan masing-masing memiliki program untuk menangani maraknya *illegal logging*. Secara umum, koalisi *stakeholder* dalam penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dapat dilihat dari otoritas hukum belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih masing – masing *stakeholder* tersebut tidak bekerjasama dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kasus *illegal logging*. Segi penyebaran informasi juga belum berjalan secara optimal karena informasi tentang Peraturan Menteri tersebut hanya disosialisasi kepada pengusaha kayu sedangkan kepada masyarakat pada belum pernah dilaksanakan. Segi sumber daya keuangan sangat terbatas sehingga polisi hanya bisa menangkap atau menindak hanya pada item-item tertentu saja. Kepemimpinan Terampil juga belum berjalan maksimal. Hal ini karena pimpinan masih kurang melakukan pengawasan dan mengevaluasi para pegawainya serta kurang mengarahkan pegawainya untuk selalu mengedepankan visi organisasi.

Kata Kunci: Peran Stakeholder, Koalisi Stakeholder, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu